EDISI 22 / 2023

SMA

MAJU BERSAMA HEBAT SEMUA

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA

STOP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN SATUAN PENDIDIKAN!

0 00035 54562 0

MAJALAH
DIREKTORAT SMA
PEMIKIR • PEJUANG • PEMIMPIN

TUT WURI HANDAYANI

PRAMUKA
Sumber Daya Manusia
YANG PROFESIONAL DAN PROPESIONAL

TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

Selamat
HARI PRAMUKA NASIONAL

14 AGUSTUS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

MERDEKA BELAJAR | 25

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKSP) di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokus terbesarnya adalah implementasi yang efektif, menggunakan data, dan melibatkan berbagai pihak.

Peraturan ini menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015, regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Permen PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, dan tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan potensinya.

- Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan
- Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan yang mungkin terjadi
- Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan (satgas) oleh pemerintah daerah diatur lebih rinci
- Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefinisikan dengan jelas
- Pembagian dan alur koordinasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan lebih jelas antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek

Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Perundungan
- Kekerasan seksual
- Diskriminasi dan intoleransi
- Kebijakan yang mengandung kekerasan

Keenam kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/*online*)

Kemdikbud.RI | Kemdikbud_RI | kemdikbud.ri | KEMENDIKBUD RI | kemdikbud ri

DAFTAR ISI

Salam Direktur

06 Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dunia Pendidikan

Utama

08 Menangani Kekerasan dengan Perspektif Korban

12 Dukungan Berbagai Lembaga Masyarakat terhadap Permendikbudristek PPKSP

16 Kekerasan dan Akibatnya Bagi Generasi Bangsa

Khusus

18 Guru, Murid, dan Orang Tua Menyambut Permendikbudristek PPKSP

22 TPPK Harus Segera Dibentuk

24 Pentingnya Asesmen Nasional untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berita Direktorat

26 Program Sekolah Penggerak Penyelamat Transformasi Pembelajaran

30 Kantin Sehat SMA, Penyedia Makanan Bergizi bagi Peserta Didik

32 Pecahkan Rekor Dunia, 15 Ribu Orang Main Angklung Bareng

34
Profil Sekolah

SMA Negeri 5 Kota Bengkulu
Mengenalkan Kurikulum Merdeka melalui Aktivitas Seru di Sekolah

Inovasi

36
SMAN 5 Yogyakarta
Cara Inovatif Menghalau Kekerasan di Sekolah

38
SMAN 1 Cibadak
Sekolah Penggerak, Menggerakkan Peserta Didik Lebih Kreatif

42
Kata Duta SMA

Nathania
Pemenang Kompetisi Sains di Taiwan

44
Hikayat

H.O.S. Tjokroaminoto
Bapak Bangsa, Guru para Pemimpin Besar

46
Kosakata

Benarkah Kata Serapan Lebih Keren?

SMA MAJU BERSAMA HEBAT SEMUA
PEMIKIR - PEJUANG - PEMIMPIN

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA

Pengarah :
Winner Jihad Akbar

Dewan Redaksi:
Budi Suprapto
Fathnuryati Hidayah
Untung Wismono
Soripada Harahap
Rina Imayanti
Irfan Harry Prastya

Pemimpin Redaksi:
Jim Bar Pen

Redaktur Pelaksana:
Ihsan Maulana

Editor :
Agus Mardianto
Wiwik Setyowati
Fuad Yusril Wahab
Relia Apita Fahrurisa
Amalia Adhi Saleh
Roy Ridho Ubay Putra

Reporter:
Teguh Imam Sudarajat
Muwarni Santoso
Whika Cahyo Saputro
Ferriatman

Fotograper:
Muhammad Reza
Marthin Luter Barus
Ryan Armenderis

Desainer Tata Letak :
Abuyana Nur Saputra
Rully Riko Ero Niko

Sekretariat Redaksi:
Minarni Dewi
Friska Ayu Winda

Penerbit
Direktorat Sekolah Menengah Atas

Alamat Redaksi
Direktorat Sekolah Menengah Atas
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
021-759115532

Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dunia Pendidikan

Pada nomor ini kami mengusung topik pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dan seluruh warga sekolah. Ini isu yang penting yang perlu dikumandangkan mengingat kasus-kasus kekerasan masih terus terjadi, bahkan meningkat, di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekolah. Kita sering melihat video-video yang memperlihatkan tindak kekerasan beredar di media sosial.

Data mengenai kekerasan juga membuat kita tercengang. Misalnya hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan.

Temuan itu juga dikuatkan oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 yakni 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.

Data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 juga menyebutkan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133.

Fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan membuat miris kita semua. Kadang kekerasan itu terjadi demikian brutal dan di luar nalar bagaimana anak-anak kita bisa melakukan kekerasan seperti yang terlihat di video-video itu. Kita semua terhenyak dan mengelus dada.

Merasa prihatin dan mengelus dada belaka jelas tidak cukup. Seluruh elemen masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan harus melakukan tindakan nyata untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan guna menjaga muruah lembaga pendidikan sebagai benteng moral kehidupan berbangsa.

Namun upaya pencegahan akan kurang optimal tanpa payung hukum yang jelas. Karena itulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode ke-25.

Sebagai payung hukum, Permendikbudristek PPKSP tidak sekadar menjadi landasan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan seluruh seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan, tetapi juga jadi rujukan dan membuat mekanisme upaya pencegahan dan penanganan kekerasan itu dilakukan.

Apakah yang dimaksud kekerasan dalam Permendikbudristek PPKSP? Apa pun yang

WINNER JIHAD AKBAR
PLT. DIREKTUR SMA

menyebabkan pihak lain tersakiti baik secara fisik, verbal, maupun psikis, baik dilakukan secara langsung maupun daring. Ini tentunya mencakup kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi, apa pun motifnya.

Memihak Korban

Dalam Permendikbudristek PPKSP ditekankan bahwa pencegahan dan penanganan dilakukan dalam perspektif pada korban, dengan kata lain memihak kepada korban. Inilah yang tidak mudah, terutama dalam kasus kekerasan seksual, di mana yang sering terjadi korbannya adalah perempuan. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual (pelecehan) ini acap terjadi bias patriarkis yang menyebabkan korban berada dalam posisi tidak menguntungkan. Korban jadi enggan melaporkan dengan alasan malu.

Menyadari kompleksnya masalah kekerasan ini, Kemendikbudristek dalam merancang dan menggodok Permendikbudristek PPKSP melibatkan banyak pihak, seperti ditegaskan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25 di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023.

Pelibatan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi kepada penyelamatan.

Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Permendikbudristek PPKSP juga menghilangkan area "abu-abu" dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek ini juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan.

Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.

Tak hanya penanganan, Permendikbudristek PPKSP juga mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Karena bagaimanapun mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati.

Kita harus dukung Permendikbudristek dengan tindakan nyata guna menjaga muruah dunia pendidikan kita.

Menangani Kekerasan *dengan* Perspektif Korban

Seorang mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Semarang mengalami kekerasan di kampusnya. Orangtua mahasiswa tersebut kemudian melaporkan dugaan kekerasan yang dialami putranya. Namun sejak itu mereka justru menerima teror yang mengakibatkan korban kekerasan terganggu aktivitasnya dalam mengikuti pelajaran.

Di sebuah sekolah di Jember, seorang siswa kelas 7 tidak berani masuk sekolah setelah menerima kekerasan dari kakak kelasnya. Ia mengalami trauma sehingga terpaksa harus belajar sendiri di rumah.

Itu hanya dua dari begitu banyak kasus korban kekerasan. Korban kekerasan dalam banyak kasus tidak hanya mengalami kehilangan konsentrasi, tapi juga trauma yang membuatnya takut masuk sekolah atau kampus. Takut bertemu dengan pelaku atau situasi yang mengingatkannya pada peristiwa traumatik. Pada titik ekstrem trauma kekerasan bahkan berpotensi membuat korban mengalami gangguan mental hingga bunuh diri.

Korban tidak hanya mengalami kekerasan pada saat kekerasan terjadi, tapi setelah kekerasan itu terjadi yang sulit hilang bahkan sepanjang sisa umurnya. Korban dengan demikian mengalami berkali-kali penderitaan. Itulah sebabnya pencegahan dan penanganan kekerasan harus dengan perspektif korban.

Kita bersyukur bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) pada Merdeka Belajar Episode ke-25, yang berlangsung pada Selasa, 8 Agustus 2023 di di Plaza Insan Berprestasi,Kemendikbudristek, juga merinci tentang apa saja yang termasuk dalam tindakan kekerasan dan bagaimana mencegah dan menangani korban kekerasan dengan perspektif korban.

Apa itu Perspektif Korban?

Ada ungkapan yang berbunyi 'yang tidak mengalami tidak akan memahami'. Ungkapan ini hendak menyadarkan bahwa kita sudah seharusnya peka untuk mencoba memahami apa yang dialami seseorang ketika ia menerima serangan. Jangan menganggap sepele penderitaan yang dialam seseorang. Sebaliknya, kita semestinya memvalidasi apa yang dirasakannya, lalu bertindak untuk memulihkannya.

Dalam konteks penanganan korban kekerasan, ungkapan tersebut mengajak kita untuk melihat kekerasan dari perspektif korban, sehingga kita bisa tahu penanganan seperti apa yang tepat bagi korban. Jangan sampai penanganan terhadap korban kekerasan justru malah memperburuk kondisi korban secara fisik maupun psikis.

Pakar hukum Bivitri Susanti mengartikan perspektif korban adalah soal bagaimana seseorang harus berpikir seakan-akan menjadi korban yang menderita, sakit, dan mungkin tidak paham akan sebuah pertanyaan karena masih anak-anak.

Butir-butir Permendikbudristek PPKSP, secara jelas mendefinisikan apa yang disebut kekerasan, bagaimana pencegahan dan penanganannya bila kekerasan itu sudah telanjur terjadi. Salah satu contoh penanganan korban kekerasan (terutama kasus kekerasan seksual) dengan perspektif korban adalah, tidak menyudutkan korban, tidak membuat korban merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri serta makin merasa ketakutan serta tidak melindungi korban dari berbagai akibat setelah ia melaporkan kasus yang dialaminya.

Penanganan kekerasan dengan perspektif korban juga akan menghindarkan korban mendapatkan perlakuan atau situasi yang tidak adil. Selain itu perspektif korban juga berarti memberi pendampingan kepada korban saat anak melakukan proses penyidikan. Bagi pelaku, sanksi harus tetap diterapkan dengan tujuan untuk mendidik.

"Sanksi harus diterapkan, kalau tidak Permendikbudristek PPKSP ini nanti tidak bergigi," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dalam peluncuran Permendikbudristek PPKSP pada Merdeka Belajar Episode ke-25, juga merinci tentang apa saja yang termasuk dalam tindakan kekerasan dan bagaimana mencegah dan menangani korban kekerasan dengan perspektif korban.

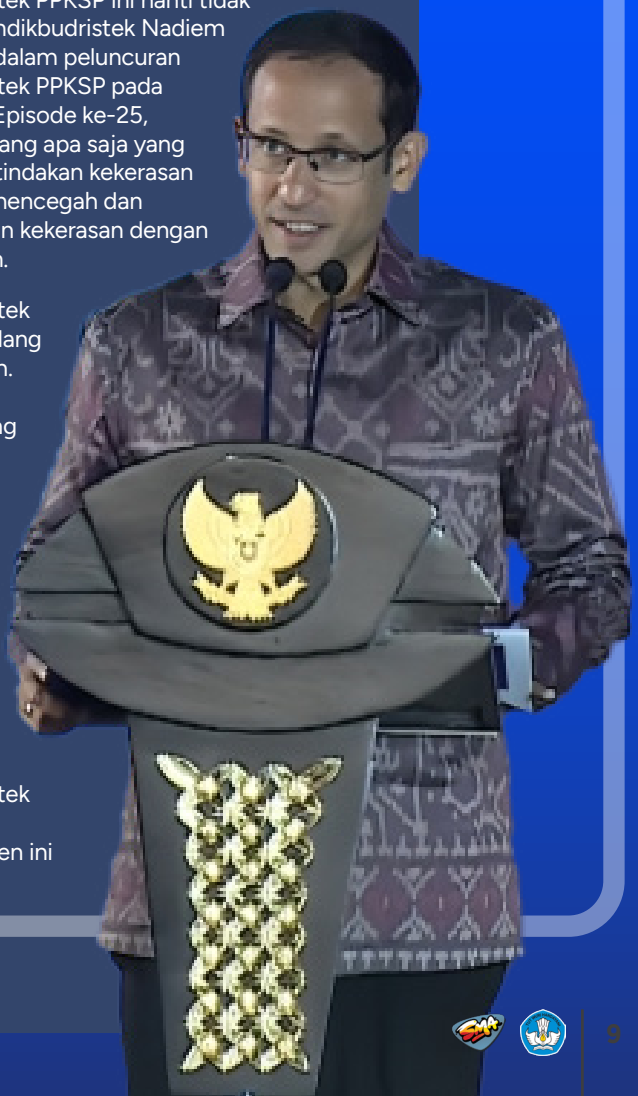

Permendikbudristek PPKSP boleh dibilang sebuah terobosan. Bukan hanya pendefinisian yang jelas mengenai apa saja tindakan kekerasan dan mekanisme serta alur penanganannya saat kekerasan tersebut terjadi.

Seperti dikatakan Menteri Nadiem, inovasi terbesar Permendikbudristek PPKSP ini adalah bagaimana permen ini

akan melindungi seluruh warga sekolah dan satuan pendidikan tanpa kecuali dari kekerasan. "Baik kejadian kekerasan kepada murid maupun guru, di dalam maupun luar sekolah, itu jadi tanggung jawab sekolah," kata Nadiem.

Apabila ada kekerasan di rumah, dan murid sebagai korban melaporkan, itu jadi tanggung jawab sekolah. Termasuk ketika terjadi di luar rumah. Adapun definisi kekerasan mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan secara verbal dan nonverbal, melalui medsos.

Melalui Permendikbudristek PPKSP ini, Nadiem Makarim menegaskan bahwa negara mengambil posisi yang jelas tentang apa itu kekerasan. Ia mengajak semua elemen satuan pendidikan tidak lagi menormalisasi kekerasan, menganggap biasa.

Permendikbudristek PPKSP diterbitkan jelas karena makin banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Survei Asesmen Nasional tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan.

Temuan itu juga dikuatkan oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 yakni 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.

Data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 juga menyebutkan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133.

Bayangkan, betapa besarnya angka-angka tersebut. Kalau separuh dari 36 persen saja, artinya 10 persen anak-anak kita mengalami kekerasan atau 1 dari 10 anak-anak kita. Ini adalah data yang masuk, yang tidak masuk tentu lebih banyak. Mendikbudristek menegaskan sekolah-sekolah yang tidak mau menyentuh topik ini, tidak melakukan sosialisasi, yang mengira topik ini tabu akan ditegur.

"Semakin tidak mau mengangkat topik kekerasan ini, justru risiko kekerasan makin tinggi. Sebaliknya sekolah yang berani mengangkat topik ini, insidensinya lebih kecil," kata Nadiem Makarim yang akrab disapa Mas Menteri, mengingatkan.

Masalah kekerasan memang menjadi isu global. Karena itu penanganannya harus serius karena menjadi salah capaian Sustainable Deveopment Goals (SDGs). Sebagai bagian dari masyarakat global, dan jadi pemimpin di ASEAN, Indonesia harus harus selangkah di depan untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Bagaimanapun tidak ada artinya kita melakukan transformasi pendidikan, transformasi pelatihan guru, kurikulum, kalau anak-anak kita tidak merasa aman dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun tempat lain.

Salah satu *requirement* dari pembelajaran adalah memberi perasaan aman. Tanpa rasa aman tidak akan ada pembelajaran. "Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan isu kekerasan ini, kita tidak bisa melanjutkan isu literasi dan numerasi. Kekerasan harus kita serang bersama," tegas Mas Menteri.

Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

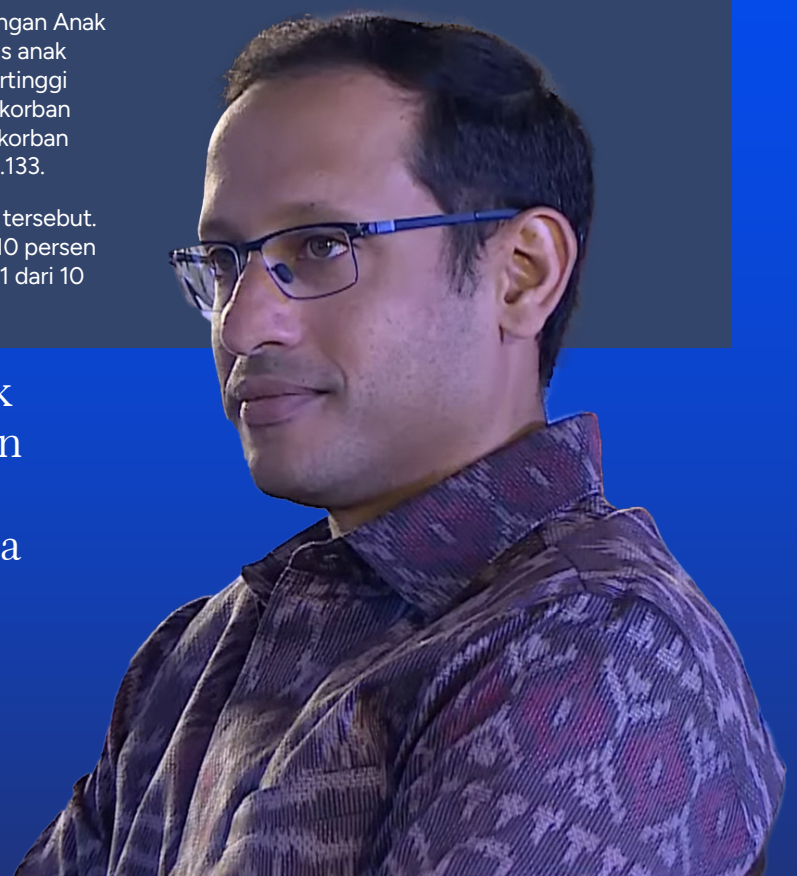

> Inovasi terbesar Permendikbudristek PPKSP ini adalah bagaimana permen ini akan melindungi seluruh warga sekolah dan satuan pendidikan tanpa kecuali dari kekerasan.
>
> **Nadiem Makarim**

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

HARI AKSARA INTERNASIONAL

8 SEPTEMBER 2023

MERDEKA BELAJAR

Dukungan Berbagai Lembaga Masyarakat terhadap Permendikbudristek PPKSP

Pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh hanya sebuah kementerian. Dibutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Lima kementerian dan tiga lembaga tandatangani Nota Kesepahaman Pencegahan Penanganan Kekerasan.

Kekerasan merupakan masalah yang serius. Trauma yang dialami korban kekerasan berdampak besar terhadap fisik dan psikisnya dalam waktu yang panjang. Apalagi apabila korbannya masih anak-anak, penderitaan yang ditimbulkannya akan berpotensi mengganggu masa depannya.

Begitu seriusnya masalah kekerasan sehingga komunitas global pun terus mengangkat isu ini dan bahkan menjadikannya sebagai capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karena itu kita juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Penanganan masalah ini tidak akan berjalan optimal bila hanya dilakukan oleh satu dua kementerian dan lembaga mengingat kompleksitasnya masalah ini.

Begitu pula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak bisa sendirian

dalam melakukan pecegahan dan penanganan masalah kekerasan. Maka selama beberapa tahun sebelum meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) pada Selasa, 8 Agustus 2023, Kemendikbudristek mengajak berbagai pihak untuk turut sumbang saran dalam penyusunan rancangan kemudian mematangkannya.

Berbagai pihak tersebut mulai dari organisasi masyarakat keagamaan seperti antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Fatayat, Aisyiyah, Majelis Pendidikan Kristen. Selain itu dari kementerian ada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos) Tri Rismaharini, dan Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; sedangkan dari lembaga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ketua Komnas Disabilitas.

Nota Kesepahaman

Empat hari sebelum Permendikbudristek PPKSP diluncurkan, tepatnya pada Jumat, 4 Agustus, lima kementerian dan tiga lembaga telah menandatangani Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (NK PPKSP). Nota Kesepahaman (NK) PPKSP ini dilakukan Kemendikbudristek bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang diwakili Sekretaris KemenPPA Pribudiarta Nur Sitepu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Sholihah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia.

"Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen bersama yang nantinya akan ditindaklanjuti perjanjian kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi Permendikbudristek PPSKP bergerak dengan cepat dan menyeluruh," ungkap Nadiem.

Pada kesempatan penandatanganan NK PPKSP, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi Nota Kesepahaman PPKSP. "Atas nama Kementerian Agama, saya menyambut baik dan mendukung penuh tindak lanjut dan implementasi Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ini," ucapnya.

Menteri Yaqut menyebut bahwa semestinya di dunia pendidikan tidak boleh ada lagi perundungan, kekerasan, maupun intoleransi. Namun faktanya, kekerasan yang disebut sebagai tiga dosa besar pendidikan tersebut masih terjadi di dunia pendidikan.

"Semoga ikhtiar kita bersama dalam rangka menjamin satuan pendidikan ramah anak dan menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang paling aman dari kasus-kasus perundungan dan kekerasan seksual ini bisa kita segera wujudkan. Mudah-mudahan apa yang kita tandatangani ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, untuk anak-anak kita semua," ucap Menag.

> Semoga ikhtiar kita bersama dalam rangka menjamin satuan pendidikan ramah anak dan menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang paling aman dari kasus-kasus perundungan dan kekerasan seksual ini bisa kita segera wujudkan.
>
> **Yaqut Cholil Qoumas**

> Kesepakatan ini sangat baik meskipun kita juga tetap butuh dukungan dari masyarakat, bukan hanya orang tua murid tetapi juga masyarakat semua.

Tri Rismaharini

Mensos Tri Rismaharini pun turut menyambut baik adanya NK PPKSP. Menurutnya, langkah Ini merupakan kesepakatan yang telah ditunggu sejak lama guna mengatasi berbagai persoalan menyangkut tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

"Sejak awal saya menjabat menjadi menteri, hampir setiap hari saya menangani kasus anak, terutama masalah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu, kesepakatan ini sangat baik meskipun kita juga tetap butuh dukungan dari masyarakat, bukan hanya orang tua murid tetapi juga masyarakat semua," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia berharap kolaborasi antar kementerian/ lembaga sebagaimana tertuang dalam NK PPKSP dapat diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan sehingga mampu mengeliminasi kekerasan di dunia pendidikan dan mendorong percepatan pembangunan Indonesia yang inklusif.

"Mari menjadikan hari ini menjadi langkah yang semakin menguatkan dan mengeratkan satu sama lain untuk berkolaborasi dalam upaya melakukan pencegahan serta menangani kekerasan pada satuan pendidikan secara khusus dan secara umum di masyarakat," ucap Dante.

Menurut Dante, Satuan Pendidikan memiliki peran strategis melalui edukasi untuk membangun sensibilitas terhadap penyandang disabilitas yang dibangun mulai dari kalanagn pendidik, peserta didik, oran tua, dan seluruh kalangan masyarakat yang ada dalam ekosisitem pendidikan.

"Dalam rangka membangun sekolah yang inklusif program-program dan kegiatan sekolah bisa dibangun dengan mengolaborasikan penyandang disabilitas dan non disabilitas dan membuat capacity builiding bagi non disablitas untuk membangun perspektif pemahaman yang baik.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Inisiasi untuk menyatukan komitmen bersama lintas kementerian lembaga dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan adalah sebuah langkah strategis yang harus dilakukan.

"Bagi Komnas HAM, Nota Kesepahaman ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat program unggulan yang telah diinisiasi sejak tahun 2014 lalu yang bernama Sekolah Ramah HAM. Program ini telah dilaksanakan di berbagai daerah dan menjadi upaya penanggulangan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di dunia pendidikan," jelasnya.

Selanjutnya Komnas HAM akan fokus mendorong adanya mekanisme dan regulasi dan pencegahan yang optimal dari keberulangan serta kebijakan yang berpihak kepada korban di dalam kekerasan termasuk di Satuan Pendidikan. "Mari membangun kesadaran HAM untuk menghilangkan bentuk pelaziman terhadap perendahan martabat yang terjadi di dalam kekerasan perundungan."

Senada, Ketua KPAI Ai Maryati Sholihah menganggap komitmen yang disatukan dalam penandatanganan NK PPKSP sebagai yang juga diikat dengan komitmen pemerintah daerah menjadi satu langkah maju dan terobosan yang luar biasa. "Data-data yang terlaporkan kepada kami merupakan fenomena gunung es, jadi mari sama-sama kita kuatkan langkah untuk terus kita tekan, untuk terus kita hapus kekerasan di dunia pendidikan yang kita cintai ini," ujarnya.

Saat peluncuran, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang turut menghadiri Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25 menyampaikan dukungannya secara langsung. Ia meyakini bahwa Permendikbudristek PPSKP dibuat bukan hanya *top to down*, tapi juga sudah menjaring dan berkomunikasi dengan banyak pihak.

Mendagri Tito juga menegaskan kementeriannya siap untuk mendukung sepenuhnya agar 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten semua berada pada kapal yang sama (dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan).

"Kita akan sosialisasikan kepada rekan-rekan di daerah dan nanti kalau ada salah satu tugasnya membuat peraturan turunan daripada Permendikbduristek ini, kita siap juga untuk mendukung, ada opsi peraturan kepala daerah bahkan bila perlu diangkat lebih tinggi menjadi peraturan daerah," tegasnya.

> Kita akan sosialisasikan kepada rekan-rekan di daerah dan nanti kalau ada salah satu tugasnya membuat peraturan turunan daripada Permendikbduristek ini, kita siap juga untuk mendukung, ada opsi peraturan kepala daerah bahkan bila perlu diangkat lebih tinggi menjadi peraturan daerah.

Tito Karnavian

Pada kesempatan yang sama melalui rekaman video, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang dikenal dengan Bintang Puspayoga menyatakan bahwa sebagai kementerian pengampu urusan perlindungan anak, KPPPA mendukung implementasi aturan Permendikbudristek PPKSP. Beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan terus mengawal kebijakan sekolah ramah anak, pengaduan jika ada kekerasan melalui call center SAPA 129, penyediaan layanan pendampingan melalui TPPK atau Satgas yang dibentuk di sekolah-sekolah dengan berkoordinasi pada UPTD PPA di daerah untuk memastikan pemulihan atau rehabilitasi bagi korban, saksi, dan pelaku usia anak.

"Perlindungan kepada anak Indonesia bukan hanya pekerjaan satu pihak saja, tapi tanggung jawab dan keterlibatan semua pihak. Oleh karenanya, sekali lagi, terima kasih kepada Kemendikbudristek untuk dapat terus berkolaborasi mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Anak Terlindungi Indonesia Maju," ujarnya.

Beberapa tokoh dari berbagai lembaga lainnya juga menyampaikan tekadnya untuk mendukung Permendikbudristek PPKSP. Hasto Atmojo Suroyo dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban misalnya. Ia menyatakan dukungannya terhadap peluncuran Permendikbudristek PPKSP. "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung Permendikbudristek PPKSP ini agar pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua Bidang Kebijakan Pendidikan Majelis Pendidikan Kristen Aarce Tehupeiory dalam pernyataan dukungannya ia mengajak semua elemen dalam Satuan Pendidikan untuk segera membentik tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

"Kami juga mengajak Satuan Pendidikan untuk membuat gerakan bersama membentuk tim kebhinekaan yang solusif bagi Satuan Pendidikan menuju cita-cita Merdeka Belajar," ujarnya.

KEKERASAN DAN AKIBATNYA BAGI GENERASI BANGSA

Sepekan lebih Seruni murung dan tak mau keluar kamar. Ia ketakutan setiap kali mendengar suara laki-laki, terkejut dan menolak sentuhan simpati paling halus sekalipun. Seruni, bukan nama sebenarnya, merupakan siswi sebuah SLTA di Jawa Tengah. Ia menjadi korban pelecehan seksual gurunya sendiri. Tanpa melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman si guru, ia hanya diam ketika tindak kekerasan seksual itu terjadi di ruang kelas yang sepi.

Setelah kejadian itu, sesampainya di rumah dia seperti orang yang terobsesi pada kebersihan, takut ruang tertutup dan menghindari siapapun selain keluarga intinya. Seruni membisu, enggan sekolah ataupun sekadar bertemu teman-temannya. Beruntung, orang tua Seruni cukup peka dengan perubahan putrinya. Secara bertahap ibu dan ayahnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mendengar pengakuan putrinya, mereka berusaha tenang, membawa Seruni ke psikiater dan melapor pada polisi.

Kisah Seruni tadi hanyalah secuil dari banyaknya kasus kekerasan yang menimpa generasi bangsa. Tak hanya remaja, anak-anak, laki-laki maupun perempuan sama rawannya. Terkadang, murid yang menjadi korban dengan pelaku sesama murid, guru maupun pekerja di lingkungan sekolah. Namun ada pula guru yang menjadi korban perundungan murid-murid dan atau wali murid.

Untuk melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan, Mendikbudristek menghadirkan payung hukum berupa Permendikbudristek PPKSP. Ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode ke-25, di Jakarta pada 8 Agustus 2023 lalu.

Permendikbudristek PPKSP itu disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan tersebut lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, peraturan menteri tersebut dimaksudkan pula untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, fisik, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.

Kekerasan apapun bentuknya, tentu meninggalkan bekas yang mendalam. Jika luka fisik lebih mudah disembuhkan, tidak demikian dengan luka batin atau emosional. Banyak korban kekerasan mengalami trauma, penurunan fungsi otak dan kualitas hidup bahkan tak sedikit yang berperilaku menyimpang.

Di laman pusiknas.polri.go.id misalnya, disebutkan betapa berbahayanya efek kekerasan pada anak. Di antaranya dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu, menurunnya prestasi akademik serta gangguan mental saat dewasa. Selain itu, lantaran rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dari kekerasan yang dialaminya, anak akan sulit mempercayai orang lain. Hal ini berbuntut kurang baik pada relasi pribadinya ketika dewasa. Secara fisikpun, tubuh korban lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

Tak jarang pula, pelaku kekerasan pada anak atau orang lain, dahulunya merupakan korban. Ada beberapa hal yang memicu anak-anak menjadi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku pernah menjadi korban kekerasan. Pengalaman menjadi korban kekerasan membuat seseorang merasa tak berdaya. Hal itu mengakibatkan korban tak ingin merasa tidak berdaya lagi. Bisa jadi, korban pun ingin balas dendam.

Baik Polri maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) beberapa kali menerima laporan kasus, termasuk tindak kejahatan seksual pedofilia, ternyata pelaku pada saat masih kecil merupakan korban pedofil. Trauma di masa kecil masih korban rasakan hingga dewasa, yang berpotensi membuat korban menjadi pelaku kekerasan seksual. Untuk meminimalisir terulangnya kejadian, anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapat bantuan dari psikolog atau psikiater. Sehingga korban mendapat bantuan untuk menanggulangi efek jangka panjang.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, fisik, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.

Ada sisi positif dari semakin banyaknya kasus yang terungkap. Sisi baik itu adalah tren positif karena masyarakat sudah berani melapor kemudian ini berdampak naiknya angka kejadian. Kepekaan orang tua dan masyarakat dibutuhkan dalam perlindungan anak-anak. Bila ada kejadian kekerasan pada anak, orang tua dan masyarakat wajib melapor ke pihak berwenang. Jika mengetahui dan tidak melapor, sama artinya dengan membiarkan dan tidak menolong perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Saat melapor, orang tua dan masyarakat harus mendapat pendampingan dari lembaga atau dinas terkait. Pelapor dan saksi juga mendapatkan perlindungan.

Guru, Murid, dan Orang Tua Menyambut Permendikbudristek PPKSP

Membicarakan berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, masih dianggap tabu di kalangan pendidik di sekolah-sekolah kita. Maka ketika terjadi kasus kekerasan di lingkungan sekolah, banyak pendidik di sekolah tersebut cenderung gagap, dan menolak untuk terbuka. Kasus kekerasan kemudian diselesaikan secara diam-diam.

Kekhawatiran mencoreng nama sekolah biasanya menjadi dalih yang sakti untuk tetap membiarkan kasus kekerasan mengendap. Padahal penyelesaian diam-diam justru bisa menjadi bom waktu yang berbahaya, karena akan terjadi perulangan, dan korbannya akan terus berjatuhan, mereka diperlakukan tidak adil dan kekerasan yang dialaminya akan berdampak panjang bagi masa depannya.

Seperti dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) pada Merdeka Belajar Episode ke-25, Selasa, 8 Agustus 2023, bahwa semakin menabukan menyingkap kasus kekerasan seksual, maka risiko terjadinya kekerasan semakin tinggi.

Karena itu, penting sekali pihak sekolah untuk membicarakan masalah kekerasan seksual secara terbuka kepada peserta didik sebagai upaya untuk pencegahan. Tabunya mengungkapkan masalah kekerasan seksual ini bisa jadi karena belum jelasnya definisi kekerasan seksual, bagaimana pencegahan dan alur penanganan apabila sudah telanjur terjadi.

Dengan diluncurkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP), tidak alasan lagi bagi pihak sekolah untuk menutupi-nutupi berbagai kasus kekerasan yang terjadi.

"Permendikbudristek PPKSP ini menjadi payung hukum untuk tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemendikbudristek meminta sekolah-sekolah untuk segera membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim inilah yang akan melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKSP, definisi bentuk-bentuk kekerasan pencegahan dan penanganannya," tegas Mas Menteri Nadiem.

Permendikbudristek PPKSP memang sebuah terobosan besar yang menggembirakan. Cherryl Hutajulu, siswi SMP N 1 Jayapura, dalam diskusi panel Merdeka Belajar Episode-25, merasa lega dan senang dengan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Menurut Cherryl, peraturan menteri

ini akan menjadikan sekolah jadi lebih aman dan menyenangkan.

"Tidak takut dirundung lagi karena ada kebijakan yang dibuat oleh Kemenndikbudristek. Adanya Permendikbudristek Nomor 46 2023 juga membuat kita sebagai murid tahu kemana mesti melapor ketika mengalami perundungan atau melihat perundungan dan kekerasan seksual dll." katanya.

Peserta didik atau murid berada di sekolah hingga delapan jam setiap hari. Maka harus diberikan perlindungan dan rasa aman selama delapan jam di sekolah. Proses pembelajaran tidak akan optimal bahkan gagal sama sekali bila peserta didik mengalami perundungan.

"Nggak akan fokus belajar dan bisa menyerap ilmu. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini luar biasa karena tidak hanya menguntungkan murid tapi juga pendidik dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan," kata Cherryl.

Galih Sulistyaningra, seorang guru, sangat mengapresiasi sekali kebijakan ini karena sekolah jadi inklusif. Selama ini masyarakat mengira korban kekerasan hanya peserta didik, padahal banyak juga pendidik atau guru yang jadi korban kekerasan. "Tentunya saya mewakili guru berharap Permendikbudristek PPKSP ini bisa dijalankan dengan baik. Tinggal dibuat juknisnya," katanya.

Dia juga mengajak teman-teman guru untuk mempelajari regulasi ini dan bergerak mengambil peran, untuk menjunjung toleransi, lebih sensitif terhadap candaan seksis, rasis.

Menurut Nadiem, banyak guru-guru yang tidak bisa membedakan candaan yang melukai atau yang tidak melukai. "Di sini kita masih menganggap lucu candaan menyindir bagian tubuh, berat badan dll. Budaya guru dan murid di sini dengan di sekolah-sekolah global masih jauh. Saya senang murid dan guru bersuara pada kesempatan ini," kata Nadiem.

> Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini luar biasa karena tidak hanya menguntungkan murid tapi juga pendidik dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan.
>
> **Cherryl Hutajulu**

Hana Ristami, mewakili orang tua murid, yang sekaligus Fasilitator Ibu Penggerak Sidina Community, berpendapat senada dengan Cherryl dan Galih. Dia merasa lega dan gembira sekali mendengar paparan Mendikbudristek tentang regulasi baru yang sangat lengkap dan jelas.

> Kita sekarang punya landasan kalau terjadi kekerasan. Saya akan tertantang untuk memotivasi sekolah untuk melaksanakan regulasi ini.
>
> **Hana Ristami**

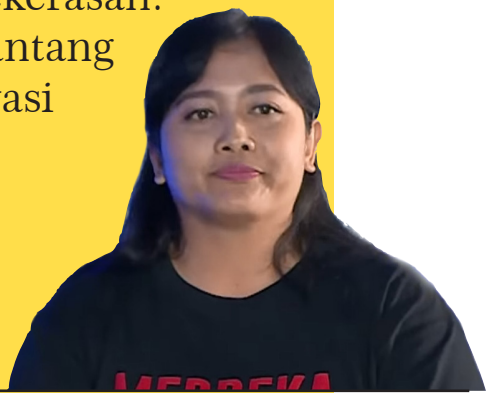

"Paparan Mas Menteri menjawab kekhawatiran kami. Kita sekarang punya landasan kalau terjadi kekerasan. Saya akan tertantang untuk memotivasi sekolah untuk melaksanakan regulasi ini," katanya.

Imelda Tirra Usnadibarata dari Save The Children Indonesia mengungakapkan hal yang sama bahwa peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan ini akan membuat masyarakat semakin teredukasi bahwa betapa pentingya melindungi anak dari kekerasan.

"Selain itu, kami juga berharap kepastian hukum yang diberikan melalui Permendikbudristek ini akan memberikan pemahaman, tidak hanya bagi tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan satuan tugas untuk mengambil tindakan-tindakan bagi siapa pun yang melakukan kekerasan, terutama kepada peserta didik. Demikian juga bagi masyarakat umum, termasuk peserta didik bahwa mereka dilindungi dari kekerasan melalui Permendikbudristek ini," katanya.

Suara yang agak berbeda muncul dari Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir. Dia berpendapat Permendikbudristek PPKSP tidak bakal mempan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah, apabila para warga sekolah belum mendapatkan edukasi.

Menurutnya, regulasi itu hanya akan efektif apabila pemerintah mengedukasi keluarga, warga sekolah mulai dari tenaga pendidik, penjaga sekolah, kepala sekolah, murid untuk mengenali apa itu kekerasan dan bagaimana mengatasinya. "Karena itu Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 harus disosialisasikan secara intens kepada warga sekolah," kata Dudung.

Sosialisasi Permendikbud PPKSP memang sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan, seperti dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Sholihah. Dia meminta seluruh stakeholder yang terlibat dalam perlindungan anak menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 ini sebagai terobosan yang telah dinantikan oleh banyak pihak.

Ia mengapresiasi atas lompatan-lompatan yang tertuang dalam Permendikbud tersebut sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya. Maryati menyambut baik inisiatif pemerintah dalam merespons masalah di lapangan dengan menerbitkan payung hukum terkait.

"Jadi bukan hanya sebatas komitmen, kita harus melangkah bagaimana pencegahan dilakukan di level satuan pendidikan, di masyarakat, hingga Pemda dan pemerintah pusat. Terobosan ini memberi jalan dan ruang yang cukup jelas sebagai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

> Permendikbudristek ini akan memberikan pemahaman, tidak hanya bagi tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan satuan tugas untuk mengambil tindakan-tindakan bagi siapa pun yang melakukan kekerasan, terutama kepada peserta didik.
>
> **Galih Sulistyaningra**

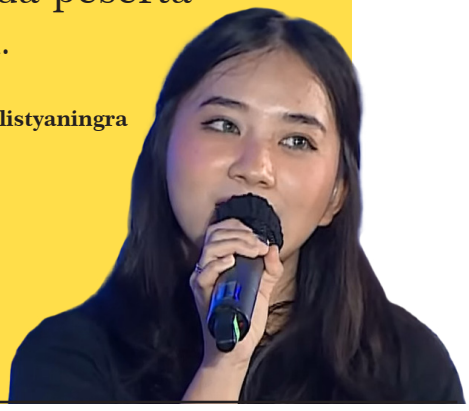

Selamat atas Pelantikan

Bapak Dr. Praptono, M.Ed.

sebagai

Sekertaris Direktorat Jenderal
PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
KEMENDIKBUDRISTEK

Semoga amanah yang di berikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan lebih maju

TPPK
Harus Segera Dibentuk

Peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) memberi harapan bagi banyak korban kekerasan yang selama ini diam.

Seperti dikatakan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, jumlah korban kekerasan yang sangat banyak berdasarkan survey yang dilakukan sejumlah lembaga seperti fenomena gunung es. Yang terdata hanya sebagian kecil, kasus-kasus kekerasan yang tidak terdata jauh lebih banyak, lantaran korbannya tak tahu mesti mengadukan kepada siapa kekerasan yang dialaminya. Belum lagi perasaan takut dan malu karena selama ini penanganan korban kekerasan membuat makin tersudut.

Namun, harapan itu akan tinggal sebagai harapan apabila Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang menjadi ujung tombak dari Permendikbudristek PPKSP ini tidak segera

dibentuk. Dalam poin-poin Permendikbudristek PPKSP dikatakan bahwa Untuk memastikan adanya respon cepat penanganan kekerasan ketika terjadinya kekerasan di satuan pendidikan, satuan pendidikan perlu membentuk TPPK serta pemerintah provinsi kabupaten/kota membentuk Satuan Tugas.

Adapun rinciannya adalah, kepala satuan pendidikan menetapkan keanggotaan TPPK di PAUD dan SD minimal beranggotakan tiga orang, terdiri dari perwakilan pendidik, perwakilan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali, jika diperlukan keanggotaan TPPK dapat ditambah dari unsur tenaga kependidikan. Untuk PAUD, jika memiliki keterbatasan sumber daya manusia, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa PAUD yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Sedangkan untuk di SMP, SMA, dan SMK, kepala satuan pendidikan menetapkan keanggotaan TPPK minimal beranggotakan tiga orang, yaitu perwakilan pendidik, perwakilan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali, jika diperlukan keanggotaan TPPK dapat ditambah dari unsur tenaga kependidikan.

Pada pendidikan nonformal kepala satuan pendidikan menetapkan keanggotaan TPPK minimal beranggotakan tiga orang yang berasal dari perwakilan pendidik. Kepala satuan pendidikan tidak dapat menjadi anggota TPPK.

Selanjutnya kepala pemerintah daerah melalui usulan dinas pendidikan menetapkan satuan tugas provinsi dan satuan tugas kabupaten/kota sesuai kewenangan satuan pendidikan. Keanggotaan satuan tugas adalah dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang pendidikan; dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak; dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial, organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.

Sementara itu untuk syarat pembentukan TPPK dan Satuan Tugas antara lain: tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman lima tahun atau, lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan/ atau, tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang maupun berat. Persyaratan ini penting untuk dijelaskan secara detil agar lebih mudah dilaksanakan. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, TPPK bisa dibatalkan karena berpotensi tidak tertanganinya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun satuan pendidikan.

Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan juga diatur di dalam permen Permendikbudristek PPKSP. Disebutkan bahwa baik anggota TPPK maupun satgas akan berakhir masa keanggotaannya apabila masa tugas anggota TPPK atau satgas berakhir yaitu dua tahun bagi TPPK dan empat tahun bagi satgas; meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya; terbukti melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yangdilakukan Satuan Tugas.

Selain itu TPPK akan diberhentikan status keanggotannya apabila menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan; berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; pindah tugas atau mutasi.

Kita semua mengharapkan pemerintah daerah satuan pendidikan dan sekolah-sekolah dapat melaksanakan amanat Permendikbudristek PPKSP, agar seperti dikatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kita terhindar dari tiga dosa besar: kekerasan seksual, prundungan, dan intolerasi.

Semua kementerian, lembaga/badan yang turut menandatangani nota kesepahaman pencehaan dan penanganan kekerasan punya tanggung jawab moral untuk secara bersungguh sungguh dan bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita semua.

Pentingnya Asesmen Nasional untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Melakukan penilaian atau mengevaluasi sistem pendidikan nasional sangat penting untuk melihat efektifitas pendidikan yang sudah berjalan. Indikasi keberhasilan pendidikan adalah peserta didik mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam keseharian mereka.

Pada sisi lain diperlukan peningkatan sistem evaluasi pendidikan. Inilah adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang juga didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana penerapan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, perubahan mendasar pada Asesmen Nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil.

Dalam sebuah webinar, Mendikbud menegaskan bahwa potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil Asesmen Nasional menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia.

Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program keseteraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini, menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan.

"Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bantuk angka atau secara kuantitatif," tutur Mendikbud.

Bagian kedua dari Asesmen Nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila. "Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif."

Bagian ketiga dari Asesmen Nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Asesmen Nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar (*baseline*) dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. "Hasil Asesmen Nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya," kata Mendikbud.

Kemendikbud akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah.

"Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa Asesmen Nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus demi Asesmen Nasional," kata Mendikbud.

Senada dengan Mas Menteri, Doni Koesoema, anggota Badan Standar Nasional Pendididikan (BSNP), periode 2019 – 2023, mengatakan, Asesmen Nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan.

"Melalui asesmen yang lebih berfokus, diharapkan perbaikan kualitas, layanan pendidikan bisa semakin efektif. Dengan demikian Kepala Dinas harus memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di daerah dengan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dan keselamatan peserta didik bila pandemi Covid-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik," ujar Doni.

Untuk itu, Pemerintah mengajak semua para pemangku kepentingan untuk bersiap dalam mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Peserta Asesmen Nasional

Peserta Asesmen Nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek yang berada di jenjang SD/MI/Paket A kelas V, maksimal 30 peserta didik; untuk SMP/MTS/Paket B kelas VIII, maksimal 45 peserta didik, dan; untuk SMA/MA/Paket C, SMK kelas IX maksimal 45 peserta didik.

Siswa yang memiliki hambatan intelektual atau hambatan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan asesmen secara mandiri/tanpa bantuan boleh untuk tidak mengikuti Asesmen Nasional, contohnya siswa pada SLB A, SLB C, dan SLB G. Namun, bila siswa pada SLB lainnya juga mengalami hambatan untuk pelaksanaan secara mandiri juga tidak diikutkan sebagai peserta Asesmen Nasional tetapi guru dan kepala satuan pendidikan harus tetap mengikuti Asesmen Nasional, khususnya sebagai peserta survei lingkungan belajar.

Selain siswa guru juga harus mengikuti Asesmen Nasional, namun tidak seperti siswa yang memiliki batasan jumlah peserta, pada guru tidak ada batas minimal jumlah peserta dalam mengikuti Asesmen Nasional. Jadi, semua guru baik yang status kepegawaian tetap maupun yang status kepegawaiannya lepas/honorer, karena tujuan Survei Lingkungan Belajar adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik.

Tidak, Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen Nasional hanya menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.

Program Sekolah Penggerak Penyelamat Transformasi Pembelajaran

Sebelum sekolahnya menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), Yuliana Giawa, Kepala SD Negeri 077311, Tuhoowo, Nias Selatan, hampir putus asa karena besarnya tantangan yang dihadapi. Maklum lokasi sekolahnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Sinyal susah, listrik juga sering padam. Gedung sekolahnya jauh dari kata memadai. Jelek dan banyak tambalan di sana-sini. Sampai ia nyaris mengundurkan diri sebagai kepala sekolah karena frustasi.

Saat nyaris putus asa itulah Yuliana menemukan Program Sekolah Penggerak. Ia kemudian mencoba mendaftar. "Saat hendak daftar, mati lampu. Internet mati. Dalam hati kecil saya, rasa-rasanya tak mungkin sekolah ini bisa bergabung dengan Program Sekolah Penggerak," tuturnya.

Yuliana terus mencoba dan mencoba. Saat tak ada sinyal, Yuliana sampai rela menggantungkan gawainya di pohon besar yang ada di halaman sekolah. "HP saya sampai diikat karet, digantung di atas pohon besar demi mendapatkan sinyal," kenangnya.

Hasilnya ternyata tak sia-sia. Sekolah Yuliana yang ada di tengah hutan akhirnya terpilih sebagai salah satu sekolah yang bergabung dengan PSP Angkatan I. Melalui pendekatan yang berfokus pada kebutuhan satuan pendidikan dan berkat dukungan dari guru dan masyarakat sekitar, Yuliana akhirnya berhasil menemukan kepercayaan dirinya kembali.

Kisah di atas dituturkan Yuliana dalam video yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) serta melibatkan melibatkan Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat PMPK, di Hotel Trembesi BSD, Tangerang, Kamis, 24 Agustus 2023.

Yuliana merasakan bagaimana intervensi PSP telah mengubah wajah sekolahnya yang berada di daerah terpencil, juga dalam tingkat partisipasi murid, peningkatan hasil akademis, dan perkembangan keterampilan sosial serta kepemimpinan dari pelaksanaan program tersebut.

Dalam video inspiratif tersebut, Yuliana juga melakukan pengimbasan ke sekolah lain, yaitu di SDN 071187 Amuri. “Melalui Bu Yuliana Giawa, kami bisa mengerti dan memahami bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka. Dan kami mulai pembelajaran menggunakan barang-barang di sekitar seperti daun dan botol sehingga kami bisa lebih kreatif untuk mengajari murid. Kami diajari menggunakan PMM dan juga pembuatan poster pengajaran agar murid menjadi lebih mengerti. Bu Yuliana Giawa tetap siap sedia untuk berbagi pengalaman dengan langsung hadir di sekolah atau via telekomunikasi,” tutur Masrawati Zega, guru SDN 071187 Amuri.

Kisah Yuliana menjadi salah satu bagian dari sekian bukti nyata bagaimana Program Sekolah Penggerak mampu mengubah dan memberikan harapan baru bagi para murid dan ekosistem pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang nyata.

Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dimulai pada tahun 2021 bagi sekolah terpilih di beberapa daerah di Indonesia, kini menjadi pancaran harapan dan inspirasi bagi banyak sekolah lain. Melalui dedikasi yang tak tergoyahkan dan pendekatan inovatif, para pelaksana PSP mampu menghadirkan perubahan positif berupa transformasi pembelajaran di daerahnya dan menerangi jalan bagi generasi mendatang.

Menurut praktisi komunikasi Devie Rahmawati, Program Sekolah Penggerak sanga luar biasa, karena

Rosmawatin **Yuliana Giawa**

fokus pada sekolah di daerah terpencil dan terpinggirkan.

Peluncuran dihadiri ratusan undangan dan pemangku kepentingan yang hadir dari berbagai daerah. Mereka menyaksikan wujud perjuangan guru yang inspiratif dalam menghadapi tantangan kompleks, dan tertuang ke dalam bentuk buku dan video.

Selain video, ada enam buku yang merekam pengalaman terkait pelaksanaan PSP oleh beberapa kepala sekolah. Para kepala sekolah yang hadir dalam kesempatan dalam sesi bedah buku adalah Eka Susianti (Kepala TK Kemala Bhayangkari, Situbondo); Henny Leiwakabessy (Kepala SDN 257 Maluku Tengah); Nana Mulyana (Kepala SMP S Al-Ma'shum Mardiyah, Cianjur); Hotnida Hutagaol (Kepala SMA Santa Patricia); dan Khofni (Kepala SLB Negeri Penajam Paser Utara). Sementara untuk sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait video, kepala sekolah yang hadir adalah Rosmawatin (Kepala TK Kosgoro Donggala); Yuliana Giawa (Kepala SD Negeri 077311, Tuhoowo, Nias Selatan); Veronika Benge (Kepala SMP Negeri 4 Poco, Ranaka, NTT); Mesak Mantek (Kepala SMA Negeri 2 Skanto, Keerom); dan Abdul Samad (Kepala SLBN Kotabaru, Bamega).

Enam buku yang diluncurkan adalah "Cahaya dari Ufuk Timur", "Melampaui Keterbatasan Akses", "Senyum Mentari dari Pelosok Negeri", "Mengalir Seperti Air", "Menyulam Inspirasi dari Keragaman Negeri", dan "Menjadi Pribadi Mandiri".

Sementara itu, untuk video diluncurkan adalah "Praktik Baik Implementasi PSP jenjang PAUD pada TK Kosgoro Tanjung Angin, Donggala, Sulawesi Tengah"; "Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SD pada SD 077311 Tuhoowo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara"; "Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SMP pada SMP Negeri 4 Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur"; "Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SMA pada SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Keerom, Papua; serta "Praktik Baik Implementasi PSP Jenjang SLB pada SLB Negeri Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan".

Pengimbasan Praktik Baik PSP

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perilisan buku dan video tersebut merupakan bagian dari proses pengimbasan praktik baik pelaksanaan PSP. Menurutnya, melalui buku dan video tersebut, Kemendikbudristek berharap dapat diikuti sekolah lain untuk mengambil bagian terbaik dalam pelaksanaan PSP.

"PSP merupakan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-7 dan sekarang memasuki angkatan ketiga. Sudah ada 14.233 satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak dari tiga angkatan. Dari tiga tahun intervensi PSP, banyak perkembangan dan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan," terang Winner.

Winner mengapresiasi perjuangan yang

dilakukan oleh kepala sekolah dan ekosistem sekolah pelaksana PSP yang digambarkan melalui video dan narasi di dalam buku. "Meski sudah berulang kali menonton video dan membaca buku tersebut, tetapi tidak merasa bosan karena berisi kisah-kisah inspiratif," katanya.

Dia juga mengatakan, meski ada kebingungan, sedih, kesulitan-kesulitan, kefrustasian, terlihat dari awal pelaksanaan PSP tapi pihaknya juga bisa melihat ada kegigihan dan pantang menyerah. Hal ini menandakan insan pendidikan kita kuat, dengan semangat dan kegigihan, dan kesabaran ternyata kita berhasil melampaui rintangan. "Saya jadi terharu, banyak yang terus bergerak memajukan pendidikan di negeri ini meski dihadapkan pada banyak tantangan," ujarnya.

Rasa haru itu muncul setelah melihat kegigihan para kepala sekolah untuk mengupayakan yang terbaik bagi transformasi pendidikan di sekolah masing-masing di tengah berbagai keterbatasan.

"Padahal, banyak sekolah yang letaknya di daerah terpencil dan memiliki fasilitas fisik yang minim atau kurang memadai. Tak sedikit juga yang akses terhadap teknologi dan internet yang sangat terbatas. Ternyata banyak kepala sekolah yang tetap konsisten bergerak dan menginspirasi," tambahnya.

> Meski sudah berulang kali menonton video dan membaca buku tersebut, tetapi tidak merasa bosan karena berisi kisah-kisah inspiratif.
>
> **Winner Jihad Akbar, Plt. Direktur SMA**

Kantin Sehat SMA, Penyedia Makanan Bergizi bagi Peserta Didik

Makanan yang sehat dan gizi seimbang akan berdampak pada kesehatan secara menyeluruh, termasuk kecerdasan anak. Keberadaan Kantin Sehat di sekolah diharapkan menjadi wadah bagi para siswa untuk memperoleh makanan higienis bergizi seimbang. Kantin Sehat juga dapat menjadi sumber belajar siswa, baik dalam penguatan karakter maupun pencapaian kompetensi mata pelajaran yang relevan.

Demikian disampaikan Kapokja Publikasi, Komunikasi dan Advokasi Direktorat SMA Kemendikbud Ristek, Dr. Juandanilsyah, SE, MA saat membuka Bincang SMA yang membahas seputar Kantin Sekolah Sehat SMA. Webinar tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas belum lama ini dan disiarkan melalui kanal resmi Youtube Direktorat SMA. Webinar dimoderatori Mariani (Duta SMA 2022 Provinsi Kalimantan Timur) dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPU) BPOM, serta praktisi pendidikan bidang sarana dan prasarana.

Juandanilsyah menyebutkan, kantin yang sehat itu akan berdampak pada kondisi kesehatan para siswa, baik fisik maupun kesenangan mereka dalam mengonsumsi makanan yang dilihat sehari-hari.

"Nah, ini menjadi dampak besar bagi kesehatan dan kecerdasan anak didik kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya Kantin Sehat SMA sebagai suatu wadah bagi anak didik. Harapannya dapat membeli makanan higienis yang sesuai dengan kesehatan anak-anak termasuk keseimbangan gizinya," kata Juandanilsyah.

Tampil sebagai narasumber pertama adalah Ibu Cucu yang mewakili Dr. Anas Ma'ruf, MKM (Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI) dengan mengusung tema "Pembinaan Kantin Sehat Wujudkan Sehat Bergizi". Dalam materinya, Cucu menjelaskan, pada data statistik jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 bahwa anak usia sekolah dan remaja itu sekitar 23% dari total penduduk Indonesia, merupakan sasaran strategis untuk pembangunan kesehatan sebagai investasi bangsa. Menurut

Cucu, terkait isu keamanan pangan di sekolah ada beberapa penilaian yang harus diperhatikan. Pertama ialah higiene sanitasi, lalu pemakaian bahan tambah yang dilarang untuk pangan, ke tiga allergen, ke empat cemaran biologi, kemudian keracunan pangan, dan ke enam gula garam lemak.

Narasumber selanjutnya yakni Ibu Eva Yuliana Fitri S. Si., M. Epid mewakili Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, BPOM) mengangkat tema "Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kantin Sekolah". Dijelaskan oleh Eva, ketika anak-anak mengonsumsi makanan tercemar maka dikhawatirkan ada virus, bakteri, parasit, ataupun toksin yang dapat mengakibatkan kerusakan usus, peningkatan metabolik rate, menghambat sintesis protein yang akan mengakibatkan malabsorbsi, diare, memperlambat/merusak respon imun.

"Kita harus menyadari pangan yang aman sangat berperan dalam mencegah kekurangan nutrisi pada anak dan tentunya kita harus menghindari pangan tercemar yang dapat menyebabkan kekurangan vitamin, mineral sehingga dapat berdampak negatif pada anak," ucap Eva.

Lebih lanjut dalam paparan materinya, Eva mengatakan keamanan pangan di sekolah adalah tanggung jawab bersama. Perlu peran aktif dari komunitas sekolah melalui pengembangan kantin sekolah agar memenuhi prinsip keamanan pangan. Adanya pengadaan pangan yang aman dan bergizi di kantin sekolah, serta pengawasan keamanan PJAS secara mandiri untuk meminimalkan kasus keracunan di sekolah dan menunjang kebutuhan gizi bagi pertumbuhan anak sekolah.

Sementara itu, narasumber ke tiga Norman Kartaadmaja, MT sebagai praktisi pendidikan bidang sarana dan prasarana mengangkat tema "Pemenuhan Kantin Sekolah Sehat". Norman menjelaskan bahwa sekolah harus memfasilitasi ketersediaan kantin sebagai tempat para siswa dapat membeli makanan dan minuman selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual dikantin memiliki kandungan gizi dan menyehatkan bagi peserta didik.

"Dari beberapa kasus permasalahan pokok pada kantin sekolah harus adanya pemenuhan luasan kantin yang memenuhi kriteria minimal kantin sekolah. Bangunan kantin yang layak disertai pemenuhan fasilitas kelengkapan kantin sekolah yang memadai. Selain itu, kontrol dan pengendalian terhadap menu makanan dan minuman yang menjamin pemenuhan higienitas, kandungan gizi dan kesehatannya," tuturnya.

Pada 2022, Direktorat SMA telah melakukan survei Pemenuhan Kriteria Kantin Sehat secara sampel pada 4.043 sekolah SMA untuk menggali data secara langsung melalui penyebaran instrumen dari JARKOM Kemendikbud. Berdasarkan informasi yang digali mencakup review terhadap tiga aspek yaitu Pemenuhan Ketersediaan Sarana, Pemenuhan Ketersediaan Prasarana, serta Pemenuhan Pengelolaan/Pengendalian Kantin Sehat.

Kantin Sehat di SMA diharapkan menjadi wadah asupan makanan seimbang. Makanan seimbang yang tersedia menentukan kesehatan siswa dan kesiapan fisiknya dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik dapat membeli makanan dan minuman yang sehat, baik makanan utama yang seimbang atau makanan selingan. Kantin menjadi suatu aspek yang penting, karena kantin menjadi pemberi layanan pendukung kesehatan bagi warga sekitar sekolah. ***

Pecahkan Rekor Dunia, 15 Ribu Orang Main Angklung Bareng

Awal Agustus 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, berkumpul sebanyak 15.110 orang yang secara bersama-sama memainkan pergelaran angklung. Mereka membawakan dua buah lagu yakni 'Berkibarlah Benderaku' ciptaan Ibu Sud dan 'Wind of Change' yang bertema perdamaian dunia karya grup musik Scorpions, dengan bebunyian dari alat musik yang terbuat dari bambu itu.

Besarnya jumlah orang yang memainkan angklung ini memecahkan rekor dunia hingga dicatat oleh Guinness World Records (GWR), sebuah lembaga dunia yang didirikan oleh Sir Hugh Beaver di London pada 1945. Lembaga ini betugas mencatat peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di seluruh dunia ke dalam The Guinness Book of Records.

Pergelaran angklung akbar itu dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Dalam pergelaran itu, hadir pula Wakil Presiden, Ma'ruf Amin serta beberapa perwakilan dari kementerian yang ikut andil dalam prosesi Pemecahan Rekor Dunia, Pergelaran Angklung Terbesar di Dunia.

Adalah Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang mengadakan gelaran tersebut untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Ketua Panitia Acara Tri Tito Karnavian sekaligus Ketua Umum OASE KIM mengatakan, pergelaran tersebut bertujuan untuk melestarikan alat musik angklung sekaligus mendukung para seniman yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

"Pergelaran angklung ini merupakan prakarsa langsung dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi). Upaya ini bukanlah hal yang mudah, tapi pihak yang terlibat sudah berjuang dengan baik. Keberhasilan hari ini adalah hadiah untuk ulang tahun Republik Indonesia (RI) ke-78," ujarnya.

Segenap panitia dan peserta telah mempersiapkan diri sejak Oktober 2022 silam. Para peserta dari berbagai kalangan itu, dengan kompak dan disiplin mengikuti proses pelatihan selama tiga bulan. Selain para pengurus OASE KIM, peserta terdiri dari murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah kedinasan, perwakilan kementerian/lembaga, hingga para anggota Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK.

Selanjutnya, Tri Tito juga berharap dengan adanya acara Pemecahan Rekor Dunia Guinness World Records Pergelaran Angklung Terbesar di Dunia dapat meningkatkan rasa kecintaan rakyat Indonesia terhadap permainan dan alat musik tradisional sehingga dapat menjaga kelestariannya.

Proses penilaian Guinness World Records yang berlangsung selama satu jam, dimeriahkan juga dengan penampilan beberapa artis, antara lain Salma, pemenang Indonesian Idol 2023, Saung Angklung Udjo (SAU), dan kelompok musik Kahitna. Aksi mereka mampu melepas ketegangan peserta sehingga ikut bernyanyi dan menari bareng. Para tamu undangan, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim juga mendapat kejutan untuk bermain angklung bersama seluruh peserta dengan lagu Mengejar Matahari yang dipopulerkan oleh Ari Lasso.

Adjudicator Guinness World Records, Sonia Ushirogochi, mengatakan Indonesia secara resmi memecahkan rekor dunia pergelaran Angklung terbesar. Pencapaian ini memecahkan rekor sebelumnya yang berasal dari Indonesia juga dengan 5.182 peserta pada tahun 2011.

Para siswa SMA yang terlibat dalam pergelaran angklung mayoritas mengaku senang dengan pengalaman baru tersebut. Kegiatan sekolah yang sangat padat tak menyurutkan semangat mereka untuk aktif dalam persiapan pergelaran. Kegiatan semacam ini menjadi tantangan bagi mereka untuk mencintai dan melestarikan alat musik tradisional. Para pendamping pun menyatakan terima kasih kepada Kemendikbud karena telah melibatkan para peserta didik sehingga menambah wawasan mereka.

Foto-foto: BPMI Setpres

Mengenalkan Kurikulum Merdeka melalui Aktivitas Seru di Sekolah

Pendidikan sangat penting dan merupakan harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa hilang. Karena itu jangan takut untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya. SMA 5 Negeri 5 Kota Bengkulu siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan Motto Maju Bersama Hebat bersama-sama.

Eka Saputra,
Kepala SMA Negeri 5 Kota Bengkulu

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertujuan membangun profil pelajar pancasila dengan harapan siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat pendidikan di Indonesia. Melalui proyek ini siswa diharapkan tidak hanya pintar di kelas, tetapi memiliki karakter yang baik.

Di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Kurikulum Merdeka baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2023/2024, namun sudah dilaksanakan pengenalan Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah, baik guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Pengenalan Kurikulum Merdeka dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan mengundang narasumber terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Platform Merdeka Mengajar (PMM) dari Dinas Pendidikan Provinsi.

Pengenalan Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada guru dilakukan dalam bentuk *In House Training* (IHT), tim komite pembelajaran melakukan diseminasi ke guru di luar pelatihan komite pembelajaran (PKP), mulai dari membuat asesmen yang bagus sampai dengan melakukan refleksi.

Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.

Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif[1].

Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 5 Kota Bengkulu adalah terbangunnya sikap yang demokratis, contohnya adalah pemilihan ketua osis dan wakil ketua osis.

Proyek ini dilakukan melalui gerakan, yaitu:

1. Aku Sayang Bumi, gerakan ini berupa kebersihan setiap hari jumat.
2. Salam sapa pagi, gerkana berupa bagaimana guru-guru menyambut kedatangan siswa dengan memberi salam dan pengecekan terhadap kelengkapan atribut siswa,
3. Bangun Jiwa Raga, yaitu gerakan senam pagi, jalan santai, membaca Quran, salat dhuha dan ceramah agama dengan jadwal seminggu sekali.
4. Imajinasi dan Kreatifitas, gerakan ini berupa kegiatan membuat konten untuk YouTube dan media sosial seputar berbagai kegiatan di sekolah.
5. Kearifan Lokal, gerakan dengan membuat bazar makanan asli daerah Provinsi Bengkulu yang bertujuan ketika siswa tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka siswa dapat membuka usaha sendiri (kewirausahaan).

Dampak yang dirasakan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila salah satunya adalah membuat para pelajar paham tentang budaya Indonesia. Sehingga bisa memfilter pengaruh dari luar. Dengan adanya P5 siswa-siswa dapat tetap cinta Tanah Air, dan memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia karena karakter sangat berguna untuk bangsa.

Dampak positif lainnya dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah peserta didik dapat mengembangkan kompetensi selain dari mata pelajaran yang diajarkan di kelas, sehingga filosofi belajar sepanjang hayat dapat terlaksana, dan pengukuran kompetensi anak atau siswa jadi dapat lebih terlihat dengan jelas.

Bagi Siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memiliki juga mendorong dan mendampingi murid untuk pendaftaran ke perguruan tinggi menjadi lebih luas dan membuat siswa semakin nyaman belajar di sekolah dengan inovasi-inovasi yang sudah dibentuk di sekolah dan sangat bermanfaat untuk ke depan seiring itu melakukan kerja sama dengan orang lain yang sangat diperlukan dalam kehidupan sebagai laku hidup yang menjalankan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mendukung proyek-proyek yang dilaksanakan, mendukung adanya Kurikulum Merdeka, dan memberikan wadah guru penggerak di sekolah.

Cara Inovatif Menghalau Kekerasan di Sekolah

Tanpa adanya iklim yang nyaman dan aman di sekolah, proses transfer ilmu pengetahuan dan belajar mengajar tidak akan berjalan efektif. Karena itu rasa aman dan nyaman semestinya menjadi prioritas sebelum membicarakan isu yang lain.

Itulah yang coba dilakukan di SMAN 5 Yogyakarta. Sekolah yang terletak di daerah Kotagede atau wilayah selatan Kota Yogyakarta ini menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan dimulai menjelaskan apa saja indikator sekolah dengan iklim yang nyaman dan aman, yaitu tidak adanya perundungan hingga kekerasan fisik, baik yang terjadi sesama peserta didik maupun guru kepada murid atau sebaliknya.

Indikator berikutnya adalah bersih dari penggunaan narkoba, baik peserta didik maupun elemen lainnya dalam satuan pendidikan. Bahkan sekolah ini memasukkan kelengkapan fasilitas belajar, praktik pengajaran, kompetensi guru, hingga kepemimpinan instruksional kepala sekolah sebagai indikator sekolah yang aman dan nyaman.

Nah, untuk memantau iklim yang nyaman dan aman di sekolah berjalan, SMAN 5 Yogyakarta memasang CCTV di beberapa titik sekolah, mulai dari setiap sudut dan lorong sekolah. Lorong-lorong sekolah menjadi area penting untuk memantau peserta didik di sekolah.

Dengan adanya fasilitas tersebut maka diharapkan lingkungan sekolah akan terbebas dari kekerasan sesama peserta didik baik itu perkelahian ataupun perundungan. Selain itu petugas keamanan sekolah atau satpam juga ditugaskan untuk memantau siswa ketika ada kejadian yang tidak diinginkan terutama yang menyangkut dengan kekerasan.

SMA ini juga mempunyai musala sekolah yang relatif lebih besar daripada SMA lainnya di Yogyakarta. Ada yang unik dari SMA ini yaitu ketika jam istirahat ada petugas sekolah yang mengingatkan siswa untuk melaksanakan salat dengan cara membunyikan peluit dan menghampiri siswa-siswa baik di kelas ataupun di halaman sekolah. "Ini merupakan kebiasaan yang dibangun secara konsisten sehingga harapannya terbangun komitmen dari siswa untuk melaksanakan salat begitu terdengar suara adzan. Kebiasaan ini juga menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan bagi lulusan SMAN 5 yang akan dikenang sampai lulus sekolah," kata Arif Jamali, Wakil Kepala Sekolah SMAN Yogyakarta.

Selain penyediaan fasilitas ibadah untuk murid dan satuan pendidikan penganut Islam, sekolah ini juga menyediakan ruang ibadah untuk penganut Kristen dan Katholik, walaupun penganut kedua agama tersebut minoritas.

SMAN Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi murid-murid yang memiliki bakat dan kreativitas di bidang seni berupa sebuah gedung yang dilengkapi ruang audio, peredam akustik. Gedung ini juga bisa digunakan untuk pameran pakaian adat dan sebagai tempat pelatihan guru-guru untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini dilakukan dengan cara berbagi, yaitu dengan guru yang cukup memahami IKM berbagi dengan guru lain.

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Arif Jamali, mengatakan, SMAN Yogyakarta mempelajari penerapan Kurikulum Merdeka. "Kendalanya memang kebiasaan ketika ada penerapan kurikulum baru terbiasa menggunakan diklat terstruktur, sementara di Kurikulum Merdeka ini dituntut untuk lebih proaktif dan mandiri dalam mempelajari kontennya," kata Arif.

Dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sendiri, menurut Arif, sekolah masih kesulitan untuk mengukur kebermanfaatan guru dalam menggunakan PMM karena tidak ada ukuran guru dalam memakai PMM.

"Jadi ukurannya nanti bisa dilihat ketika guru sudah menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Salah satu penerapan Kurikulum Merdeka dalam mendukung Iklim Keamanan Sekolah di sekolah ini adalah dengan membuat struktur Wakil Kepala Afeksi di mana struktur ini bertugas untuk merawat keimanan kan ketaqwaan siswa dan juga menjaga toleransi antarpenganut agama satu dengan yang lain," tutur Arif.

Sekolah ini juga mempunyai pendidikan karakter sendiri yang bernama 'Hayuning Pakarti' yang berarti budi pekerti yang 'ayu' atau cantik. Hayuning Pakarti sendiri terdiri dari 25 karakter yang diambil juga dari karakter kearifan lokal dan Profil Pelajar Pancasila sudah ada di bagian Hayuning Pakarti. Kurikulum Merdeka ini memberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing tentunya dengan Profil Pelajar Pancasila sebagai dasar yang sudah harus ada.

Pada 2011 SMAN Yogyakarta dinobatkan sebagai sekolah karakter oleh Wali Kota Yogyakarta. Sejak saat itu juga Waka Afeksi pertama kali dibentuk dan memasukkan pendidikan karakter yang sudah diterapkan ke dalam kurikulum KTSP yang saat itu berjalan.

"Ketika masa pandemi, yaitu sekitar dua tahun, pendidikan karakter di sekolah ini juga diterapkan di rumah dan implementasinya sederhana yaitu pengisian angket perbuatan karakter baik yang sudah dilakukan siswa selama di rumah," tuturnya.

Keberadaan Waka Afeksi di SMAN Yogyakarta dapat menghalau masuknya paham-paham radikal dan intoleran. Paham-paham ini biasanya masuk melalui pembicara yang diundang dalam kegiatan kerohanian

Sekolah Penggerak, Menggerakkan Peserta Didik Lebih Kreatif

Kalau kita jalan-jalan ke Sukabumi, melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan 72 Cibadak, kita akan melihat bangunan gedung SMAN 1 Cibadak, Sukabumi. Sekolah yang berada di Kecamatan Cibadak ini pernah menerima penghargaan MURI (Museum Rekor Indonesia). Penghargaan tersebut diberikan atas kreativitas sekolah ini membuat peta Indonesia dengan ukuran besar yang terbuat dari nasi tumpeng.

Masuklah melalui pintu gerbangnya, kita akan disambut tata ruang yang nyaman. Tempat parkir kendaraan terlihat bersih dan teratur. Ruangan kepala sekolah, tata usaha, dan ruang kelas, mengapit taman, lapangan olahraga, lapangan serba guna yang berlapis semen.

SMAN 1 Cibadak memiliki 37 ruang, dengan 38 rombongan belajar (Rombel), di luar ruang laboratorium komputer dengan akses internet, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium IPS, studio. Secara keseluruhan SMAN 1 Cibadak memiliki Lahan tanah keseluruhan sebesar 6,940 meter persegi.

Penyelenggara Kurikulum Merdeka

SMAN 1 Cibadak didaulat menjadi Sekolah Penggerak oleh Dinas Pendidikan Sukabumi sejak 2022. Sekolah Penggerak berarti sekolah penyelenggara Kurikulum Merdeka Belajar. Sekolah ini mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sejak 2022. Pertama kali diterapkan di kelas 10, dengan tujuan membentuk karakter Pancasila peserta didik. Wujudnya adalah mereka berperilaku taat beragama, berwawasan global, toleran, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Selain itu peserta didik diajarkan dan dikenalkan kepada kegiatan belajar secara ko-kurikuler melalui proyek profil pelajar Pancasila yang fokus pada tiga proyek, yaitu kewirausahaan, rekayasa dan teknologi, dan berfokus pada gaya hidup berkelanjutan.

Proyek-proyek dilaksanakan dalam berbagai bentuk, di antaranya pekan pameran karya hasil proyek yang mencerminkan komitmen pelajar dalam menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pameran ini pelajar menampilkan produk-produk kerajinan tangan, makanan, fashion, dan industri kreatif lainnya yang dapat dikembangkan menjadi industri yang bermanfaat, juga menggambarkan semangat kewirausahaan pelajar.

Selain itu mengenalkan proyek-proyek yang dilaksanakan di sekolah kepada lingkungan sekitar sekolah, misalnya proyek yang mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan ramah lingkungan. Seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang baik, dan produk-produk organik.

Melalui proyek ini, pelajar dapat mempelajari manajemen wirausaha dan inovasi. Terdapat pula rekayasa dan teknologi seperti *electric ball*, *virtual reality* (VR) dengan alat-alat sederhana, robotika, dan aplikasi literasi. Selain

SMAN 1 CIBADAK

SMAN 1 CIBADAK

memamerkan proyek-proyek, diselenggarakan pula seminar tentang gaya hidup keberlanjutan, di mana diperkenalkan zero waste, bagaimana mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan kembali dan menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Bramandita Angga, salah satu guru penggerak SMAN 1 Cibadak, mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh itu berjalan lancar dan memiliki manfaat untuk sekolah, maupun peserta didik.

Prisila dan Nando, siswi dan siswa SMAN 1 Cibadak, menyatakan, sangat tertarik dengan kegiatan tersebut, selain dapat mengembangkan kreatifitas juga sambil belajar. “Dari kegiatan ini saya bisa mengembangkan *zero waste*, yaitu sampah dapat dikelola dan dikembangkan menjadi produk baru lagi,” ujarnya.

Beberapa contoh produk daur ulang dari sampah itu adalah kantong tas, pot bunga, kursi, hiasan, hingga baju. Sedangkan Yando mengembangkan kewirausahaan, yaitu kripik, produk makanan yang berbahan dasar ubi jalar. “Saya beri nama Palesto. Cukup *best seller*,” kata Yando.

Media Sosial sebagai Media Belajar

Mumuh, Kepala Sekolah SMAN 1 Cibadak mengatakan, proses pendidikan selalu membutuhkan tiga hal penting. “ Yaitu konsistensi pada pembentukan karakter manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlaqul karimah. Kemudian, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompetitif dalam kehidupan. Berikutnya adalah menghasilkan, memanfaatkan, dan mengendalikan perkembangan sains dan teknologi,” katanya.

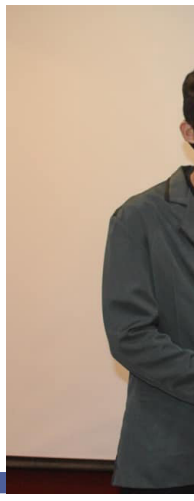

Pendidikan harus dapat mamanfaatkan seluas-luasnya perkembangan sains dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Karena itu sekolah ini telah membuat website sebagai sarana komunikasi dan informasi baik internal maupun eksternal.

Pengembangan pendidikan melalui platform media sosial di SMAN 1 Cibadak dimulai sejak pandemi Covid-19, di mana kegiatan belajar mengajar secara langsung ditutup. Situasi itulah yang memunculkan dan mewujudkan gagasan membuat radio sekolah yang diberi nama SMANDAK.

Melalui radio tersebut kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dari jarak jauh. Selain itu kehadiran peserta didik juga diperhatikan yaitu melalui daftar kehadiran melalui daring, sehingga setiap hari peserta didik dapat melakukan absensi melalui absensi Gform.

Setelah itu dikembangkan website SMANDAK Sukabumi dengan didirikan studio untuk podcast yang diberi nama LEKAT, studio edit video, dan studio pengembangan video pembelajaran khusus SMAN 1 Cibadak dikembangkan melalui platform media belajar melalui media sosial.

Setelah sekolah-sekolah dibuka kembali seperti biasa kegiatan sekolah melalui platform media sekolah semakin berkembang dan maju, contohnya pembuatan video pembelajaran, video Proyek Pengiuatan Profil Pelajar Pancasila (P50), video dokumen, video perayaan, dan lain-lain. Akhirnya

dikembangkan podcast-podcast dengan menggunakan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya, baik dari internal sekolah, maupun luar sekolah.

Guru-guru dan peserta didik SMAN 1 Cibadak kreatif mengembangkan konten-konten materi pembelajaran, supaya materi pembejaran tidak membosankan dan mudah dicerna/dipahami melalui websekolah, aplikasi-aplikasi yang dapat dari internet, juga ruang belajar.id.

Nathania
Pemenang Kompetisi Sains di Taiwan

Kemajuan peradaban manusia berutang besar kepada sains. Karena hanya melalui sains sejarah manusia mencapai puncak kegemilangannya. Sayangnya sains kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari kalangan pelajar kita, kecuali sedikit.

Nathania siswi SMAN 5 Surabaya, adalah salah satu dari sedikit pelajar kita yang memiliki perhatian dan ketertarikan yang besar terhadap sains. Ketertarikan dan kesungguhannya kepada sains mengantarkan Nathania pada satu kompetisi ke kompetisi lainnya dan menjadi juara.

Yang terbaru, penelitian Nathania yang bertajuk 'Moringa Extract (Moringa Oleifera) based Silver Nanoparticle Sisal Fabric as Antibacterial Against Methicilin-Resistan Staphylococcuss Aureus' meraih juara 1 kompetisi sains Taiwan International Science Fair (TISF) 2023, kategori Medicine and Health Science. Nathania terbang ke Taiwan untuk mengikuti kompetisi yang digelar di National Taiwan Science Education Center (NTSE), pada 5-11 Februari 2023.

Kemenangan Nathania di Taiwan merupakan kelanjutan dari prestasi yang diraih setahun sebelumnya di ajang Asean Youth Research Innovation Summit (AYRIS) 2022. Di ajang ini ia meraih Juara 1 dan Juara Favorit.

"Jadi ajang TISF ini berawal saat saya mewakili Indonesia di ajang AYRIS pada Oktober 2022. Di ajang itu saya menggunakan silver morenga atau ekstrak kelor yang disintesis dengan nanopartikel perak sebagai agen antibakteri untuk melawan bakteri salmonella typhi, yaitu untuk penyakit tifus," kata Nathania seperti dilansir laman Puspresnas.

Selepas ajang AYRIS Nathania mengikuti National Science Fair for Indonesian Adolescents (NASFIA) yang diselenggarakan Indonesia Scientific Society (ISS) secara daring pada November 2022 lalu. Di ajang ini Nathania berhasil meraih medali perak.

Capaian itulah yang membuka kesempatan yang lebih besar menghampiri Nathania. Berbagai tawaran kompetisi sains dari ajang internasional, seperti Inggris dan Spanyol, datang kepadanya. Dengan pertimbangan bahwa kompetisi di Taiwan lebih menantang, akhirnya Nathania memilih mengikuti lomba di Taiwan.

"Jadi sebenarnya ada beberapa ajakan untuk mengikuti lomba tingkat internasional. Namun, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti TISF di Taiwan karena paling challenging dan Indonesia belum pernah memenangkannya. Tapi saya tetap lakukan yang terbaik," kata Nathania.

Ketika akan mengikuti kompetisi di Taiwan, Nathania hanya memiliki waktu persiapan kurang dari tiga bulan. Di tengah kesehatan yang menurun ia mengumpulkan data pendukung dan membuat paper untuk persiapan TISF sebagai persyaratan wajib, termasuk uji antibakteri yang dia lakukan berulang untuk mendapatkan hasil yang paling mendekati ketepatan.

Dia harus meminjam microscope electron dan adanya hanya di Universitas Negeri Malang (UM). Nathania sempat meminta tolong ke UM untuk mempercepat pengujian penelitiannya hingga last minute. Beruntungnya, pada 1 Februari sudah jadi dan langsung dimasukkan ke poster.

Nathania mengaku tidak memiliki ekspektasi untuk menjadi pemenang. Tak disangka, saat pengumuman pemenang TISF, Nathania meraih juara 1 mengalahkan 21 peserta dari Singapura, Thailand, Macau, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Ukraina, Iran, Mesir, Luxemburg, Afrika Selatan, Tunisia, Turki, Italia, Brasil, Meksiko, Swiss, Republik Ceko, dan USA.

Prestasi lain yang diraih Nathania adalah Best Delegate Asia Youth International Model United Nations INTERPOL 2022, Honorable Mention Asia Youth International Model United Nations WHO 2021, dan Neuroscience Course by Harvard University Februari-Maret 2023.

Di samping itu, Nathania pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Busan, Korea Selatan. Nathania juga tak hanya berbakat di bidang sains, tetapi ia juga mempunyai bakat di bidang seni. Sewaktu kecil ia pernah mengikuti lomba piano hingga memenangkan juara di Singapura.

Prestasi Nathania yang membanggakan tidak lepas dari peran dan dukungan orang tua. Ayahnya yang seorang dokter memberi tahu dia bahwa ada bakteri yang sangat berbahaya karena resisten terhadap antibiotik. Itulah yang memicu rasa penasaran Nathania untuk menaklukan bakteri ini. Beruntung sekolahnya, SMAN 5 Surabaya mendukung penuh upayanya melakukan penelitian.

Ketertarikannya pada sains membuat Nathania melanjutkan pendidikannya di jurusan kedokteran. Ia mempunyai mimpi untuk berperan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bisa duduk di kursi World Health Organization (WHO).

Nathania tentu juga mendapat dukungan dari sekolahnya, SMAN 5 Surabaya. Sukirin Wikanto, Kepala Sekolah SMAN 5 Surabaya, mengatakan, sekolahnya punya motto 'One Student One Talent', atau satu siswa satu talenta.

"Kami apresiasi dan mendukung penuh, termasuk Nathania di tingkat nasional juara, lalu menyiapkan ke internasional. Kalau mau ke lab sekolah sebagai administrasi, misalkan ke lab UNM kita yang merekom surat-surat dan sebelum berangkat diberi penguatan mental," kata Sukirin.

SMAN 5 Surabaya mendorong murid-murid bisa menggali potensi dan kemampuan di bidangnya masing-masing, baik akademik maupun nonakademik.

Bambang Eko, guru Wali Kelas Nathania, mengatakan, Natahania memang murid berprestasi. Dia ranking 1 di kelasnya. "Saat kelas 11 dulu Nathania terpilih pelajar berprestasi di Jawa Timur, itu terbukti dia punya talenta yang baik. Kesehariannya sama dengan temannya, supel, walaupun punya prestasi ndak sombong. Aktif mencari tahu, di kelas sering bertanya," kata guru Bahasa Indonesia tersebut.

H.O.S. Tjokroaminoto
Bapak Bangsa, Guru para Pemimpin Besar

> “Setinggi-tinggi ilmu,
> sepintar-pintar siasat,
> dan semurni-murni tauhid.

Demikian kalimat inspiratif yang dilontarkan Raden Mas Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto. Bukan sekadar kata-kata mutiara biasa, melainkan bermakna dalam, tentang pentingnya menyatukan tiga unsur: ilmu, siasat, dan tauhid dalam perjuangan.

Siapa H.O.S. Tjokroaminoto? Tjokroaminoto merupakan tokoh pergerakan nasional dan mendapat gelar pahlawan nasional. Ia seorang nasionalis, muslim yang taat namun lebih memilih mengenakan peci hitam bukan sorban selayak tokoh-tokoh muslim lainnya saat itu. Pemerintah Hindia Belanda menjulukinya sebagai Raja Jawa tanpa Mahkota lantaran keberaniannya membela kaum yang lemah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Tjokroaminoto dijuluki pula sebagai guru bangsa. Ya, Tjokroaminoto merupakan guru bagi para pemimpin besar negeri ini, di antaranya Semaoen, Alimin, Muso, Soekarno juga Kartosuwiryo dan banyak lagi. Tiga muridnya yakni Muso, Soekarno dan Kartosuwiryo inilah yang di kemudian hari melahirkan tiga ideologi berbeda dan saling berseberangan. Muso yang komunis, Soekarno nasionalis dan Kartosuwiryo islamis.

Salah seorang murid kesayangan Tjokroaminto: Soekarno sempat menikahi Siti Oetari putri pertama Tjokroaminoto dan R.A. Soeharsikin. Sayang, pernikahan tersebut hanya berlangsung dua tahun dan mereka tidak dikaruniai anak.

Kisah dan perjuangan Tjokroaminoto pernah difilmkan dengan judul Guru Bangsa Tjokroaminoto (besutan sutradara Garin Nugroho, produser Christin Hakim tahun 2015). Sedangkan buku yang memuat biografinya (bersama biografi tokoh penggerak lain) adalah Memoria Indonesia Bergerak, susunan para pemuda di berbagai kampus, tahun 2014.

Tjokroaminoto lahir di Jawa Timur pada16 Agustus 1882, sebagian sumber menyebutkan ia lahir di Ponorogo, sumber yang lain menyebut Madiun sebagai kota kelahiran Tjokroaminoto. Ia merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama R.M. Tjokroamiseno, pernah menjadi Wedana Kleco, Magetan dan kakeknya R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. H.O.S. Tjokroaminoto adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo.

Tjokroaminoto menikah dengan R.A.Soeharsikin dan dikaruniai lima orang anak, antara lain Siti Oetari, Harsono Tjokroaminoto, Anwar Tjokroaminoto, Ahmad Suyud dan Siti Islamiyah. H.O.S. Tjokroaminoto meninggal pada 17 Desember 1934, setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. H.O.S. Tjokroaminoto diberi gelar Pahlawan Nasional dan jasadnya dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta.

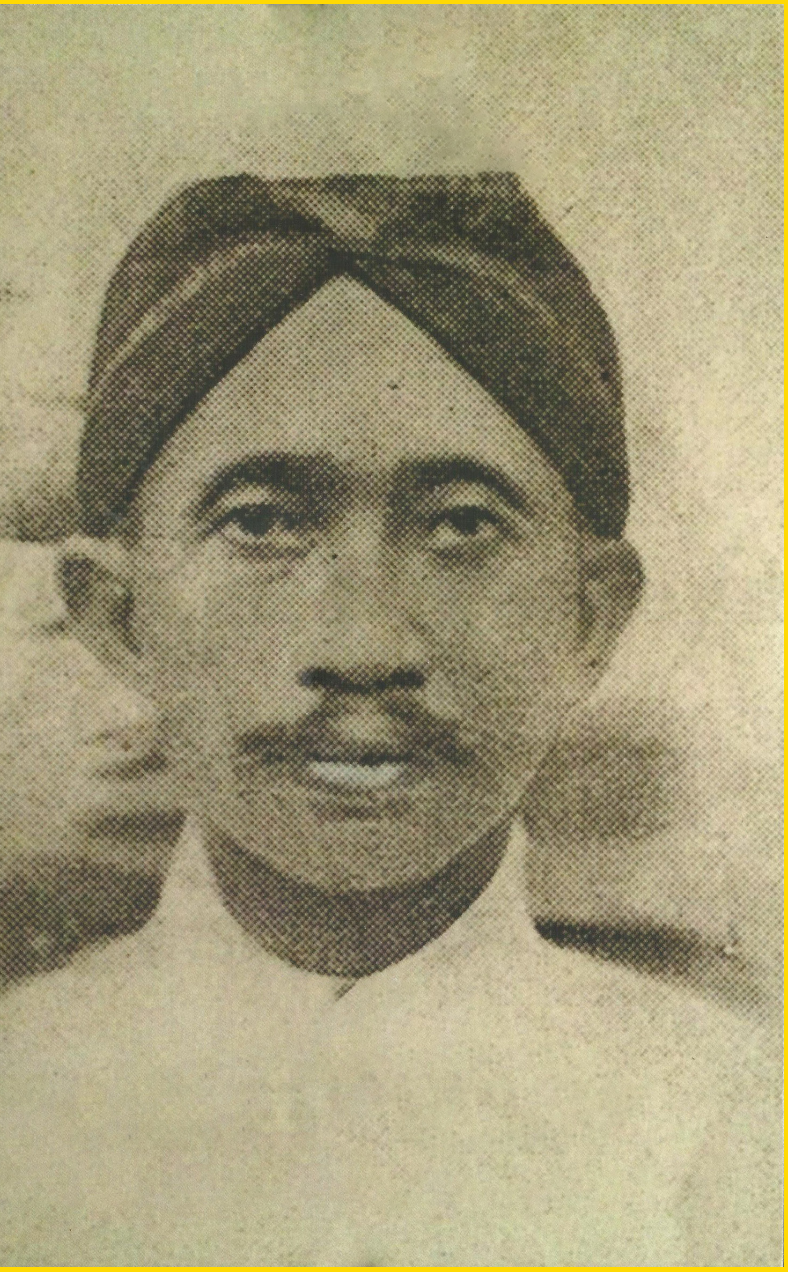

Pendidikan dan Karir

Sebelum berkiprah di dunia politik, Tjokroaminoto bekerja sebagai juru tulis. Apa pendidikannya? Setelah lulus dari sekolah rendah, Tjokroaminoto melanjutkan pendidikannya di sekolah pamong praja Opleiding School voor Inlandsche Ambtrnaren (OSVIA) di Magelang. Sekolah tersebut dikenal dengan Sekolah Administrasi Pemerintahan yang mencetak para pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Magelang pada tahun 1902.

Tamat dari OSVIA, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. Tak lama kemudian ia diangkat sebagai pembantu utama Regen (Bupati) atau Patih di Ngawi. Disini ia melihat kesewenang-wenangan orang Belanda terhadap kaum pribumi. Ia yang sejak kecil sudah mengerti akan jiwa nasionalisme, memilih undur diri dari pekerjaan setelah menikah dengan Soeharsikin. Dari pengunduran diri itu, Tjokroaminoto hijrah seorang diri ke Surabaya. Nah, di Surabaya inilah Tjokroaminoto bersentuhan dengan organisasi politik. Sewaktu baru hijrah itu, Tjokroaminoto bekerja sebagai kuli panggul dan berorganisasi dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) yang diprakarsai oleh K.H. Samanhudi. Kemudian keduanya mendirikan Sarekat Islam, agar bisa merangkul dan menaungi lebih banyak kalangan.

Tjokroaminoto kembali ke Ponorogo setelah mendapat kabar istrinya melahirkan anak, Oetari sehingga diboyonglah istri, anak dan pembantu ke Surabaya. Tjokroaminoto membuat perusahaan batik dan menerima pemuda untuk kos di rumahnya. Tjokroaminoto makin dikenal dalam konstribusinya di Sarekat Islam. Para pemuda yang tinggal di rumahnya itu, sekaligus menimba ilmu padanya. Kelak di kemudian hari mereka menjadi para pemimpin besar. Ada Semaoen, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Fajri Hamonangan pernah berguru padanya. Soekarno mempraktikkan pesan Tjokroaminoto; "Pemimpin yang Hebat Menulis Seperti Jurnalis, Berbicara Seperti Orator". Benar saja, kelak Soekarno menjadi Presiden RI yang pertama.

Di antara murid-muridnya yang lain, Tjokroaminoto memang sangat menyukai Soekarno. Ia menikahkan Soekarno dengan putrinya Siti Oetari (1905 – 1986) tahun 1921, kala itu Oetari masih berumur 16 tahun. Pernikahan tersebut hanya bertahan dua tahun, sebab setelah pindah ke Bandung untuk melanjutkan kuliah, Soekarno menceraikan Oetari secara baik-baik. Selanjutnya setelah tiga tahun berselang, Oetari menikah lagi dengan Sigit Bachroensalam. Pernikahan ke dua Oetari ini melahirkan putra Harjono Sigit Bachroensalam, ayah dari Maia Estianty, penyanyi dan pencipta lagu yang kita kenal saat ini.

Sang Teladan

H.O.S. Tjokroaminoto diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan di negeri ini. Banyak nilai ketokohan Tjokroaminoto yang dapat kita teladani, mulai dari semangat kepemimpinan, dan kemandirian. Ia juga dikenal berani mengambil risiko, berorientasi pada tindakan, dan pekerja keras. Semua nilai-nilai positif itu ia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kini, di masa kemerdekaan hasil perjuangan dan pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan para pahlawan lain, dapatkah kita meneladani nilai-nilai positif seperti itu? Rasanya, kalimat heroik "Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid" senantiasa relevan untuk kita terapkan.

Benarkah Kata Serapan Lebih Keren?

Hingga saat ini, kosakata Bahasa Indonesia yang tercatat dalam kamus mencapai 91 ribu bahkan ratusan ribu kata. Banyak dari kata-kata tersebut merupakan hasil serapan dari bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, suku-suku yang ada di Nusantara.

Mengapa bahasa Indonesia banyak sekali menggunakan kata serapan? Ada beberapa alasan, di antaranya, orang senang menggunakannya karena terkesan keren dan modern.

Sebagian orang merasa diakui atau diterima oleh kelompok/kalangan tertentu bila mengerti dan ikut-ikutan bercakap dengan kosakata yang biasa dipakai kelompok/kalangan tersebut.

Selain itu, alasan masyarakat menggunakan kata-kata serapan adalah pengucapannya lebih mudah, singkat dibandingkan dengan pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia baku. Apa saja contoh kata serapan itu? Betulkah terdengar lebih keren?

- **Bestie**

  Kosakata ini kerap digunakan dalam bahasa slang atau bahasa gaul internasional. Asalnya dari Bahasa Inggris; bestfriend. Orang-orang Indonesia terutama generasi muda beberapa tahun belakangan senang sekali memakai kata bestie untuk menyebut sahabat/teman karib. Umumnya, kata bestie digunakan dalam percakapan sehari-hari, sering pula kita dengar di jejaring media sosial.

- **Barbar**

  Dari mana asal mula kata barbar? Rupanya, kata barbar berasal dari akar kata berbagai Bahasa. Bahasa Yunani (barbarous), Bahasa Latin (barbarous), Bahasa Belanda (barbaar), Bahasa Inggris (barbarian), yang artinya kurang lebih manusia yang dianggap primitif, tidak beradab. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, definisi barbar adalah seseorang atau kelompok yang tidak beradab, seringkali ditandai dengan sifat kasar, beringas dan kejam. Jika kata barbar digunakan dalam percakapan gaul sehari-hari, misalnya dalam interaksi sosial ataupun game online; barbar berarti perilaku kasar, kurang sopan dan agresif.

Banyak juga kata-kata yang sudah akrab di telinga maupun mata kita, kita sangka itu asli Indonesia. Ternyata, serapan bahasa asing juga. Kosakata lawas tersebut di antaranya adalah;

- Aksara berasal dari Bahasa Sansekerta artinya huruf.
- Abjad juga memiliki arti huruf, namun berasal dari Bahasa Arab.
- Dana (Sansekerta) artinya uang
- Wajah (Arab) artinya muka
- Wafat pun dari Bahasa Arab yang berarti mati atau meninggal
- Ada yang tahu, kata sabun dari bahasa apa? Sabun yang biasa kita pakai untuk mandi atau mencuci pakaian, rupanya berasal dari Bahasa arab juga yakni sobuun.

Sisa-sisa Penjajah

Oh ya, Belanda yang menjajah bangsa kita 350 tahun lamanya juga mewariskan banyak kosakata. Hayoo, siapa yang menyangka kata-kata berikut ini ternyata peninggalan penjajah Belanda.

- Absensi (absentie)
- Balada (ballade)
- Bangkrut (bankroet)
- Dansa (dansen)
- Fungsi (functie)
- Gratis (gratis)
- Handuk (handdoek)
- Impas (impasse)
- Kalkun (kalkoen)
- Makelar (makelaar)
- Nanas (ananas)
- Taksir (taxeren)

Kosakata serapan dari Bahasa Portugis;

- Algojo (algoz)
- Armada
- Bendera (Bandeira)
- Boneka (boneca)
- Dadu (dado)
- Gancu (gancho)
- Garpu (garfo)
- Gereja (igreja)
- Jendela (janela)
- Kemeja (kamisa)
- Kereta (carreta)
- Kamar (camara)
- Lentera (lanterna)
- Mandor (mandador)
- Minggu (dominggo, nama hari)
- Palsu (falso)
- Peniti (alfinete)
- Pesiar (passear)
- Sekolah (escola)
- Sepatu (sapato)
- Tanjidor (tangedor)

Kalau yang berasal dari Bahasa Jepang, misalnya;

- Anime (film animasi khas Jepang)
- Bento (bekal makanan ala Jepang)
- Bonsai (tanaman perdu mini dalam pot rendah)
- Dakocan (boneka plastik berwarna hitam)
- Haiku (puisi pendek terdiri dari tiga baris)
- Jibaku (tindakan menyerang musuh dengan menabrakkan diri, nekat berani mati)
- Karaoke (menyanyi dengan diiringi musik yang telah direkam lebih dahulu)
- Origami (seni melipat kertas)

Itu hanya sebagian kosakata serapan, masih banyak yang lainnya dari negara-negara lain, atau bahasa daerah. Menurut kalian, apakah benar terdengar lebih keren atau sudah biasa?

Mekanisme pencegahan dalam kebijakan ini memastikan upaya menyeluruh agar warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan

Pencegahan	Satuan Pendidikan	Pemerintah Daerah
Penguatan tata kelola	1. Membuat tata tertib dan program 2. Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan 3. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) 4. Melibatkan warga sekolah (orang tua/wali dll)	1. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang PPKSP 2. Mengalokasikan anggaran 3. Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan 4. Membentuk Satuan Tugas 5. Melibatkan masyarakat
Edukasi	1. Sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan 2. Melaksanakan pendidikan penguatan karakter	1. Sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan 2. Melatih TPPK dan Satuan Tugas
Penyediaan sarana dan prasarana	1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan ramah disabilitas 2. Menyediakan kanal aduan	1. Menyediakan sarana prasarana yang aman dan ramah disabilitas 2. Menyediakan kanal aduan

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area "abu-abu" dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan

Kekerasan fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

Kekerasan psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

"Kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan."

Yuk Berinteraksi

Kirimkan Karyamu!

Tema:
Pelajar Pancasila

Karya Berupa :

Tulisan, Art, Komik, dan Lainnya

Syarat & ketentuan

Karya harus original tidak plagiat, karya harus sesuai dengan tema yang ditentukan, karya harus dapat ditampilkan dalam majalah

(contoh: karya berupa video tidak bisa ditampilkan)

Karya terbaik akan di tampilkan dalam Majalah SMA edisi 23, karya masksimal 2 halaman, karya dikirimkan ke kontak tim penulis Majalah SMA.

Direktorat SMA
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan

(021) 7667960
publikasi.psma@kemdikbud.go.id
www.sma.kemdikbud.go.id

SMA Maju Bersama Heat Semua | PEMIKIR • PEJUANG • PEMIMPIN

© 2023 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi